

Pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 pukul 09.30 WIB telah dilaksanakan kegiatan Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan PP No. 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Dana Partai Politik bertempat di Hotel Swiss Belin Pangkalan Bun yang dibuka oleh Wakil Bupati Kotawaringin Barat Bpk. Ahmadi Riansyah.

Tujuan utama diadakan kegiatan adalah untuk memberikan pemahaman yang sama terkait pengaturan penyelenggaraan Pemilu serentak Tahun 2019 kepada penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu dan pemangku kepentingan.

Peserta kegiatan Sosialisasi diikuti sekitar ±160 orang yang terdiri dari :

1. Komisioner KPU dan Anggota Panwaslu Kobar.
2. Para Camat dan Lurah/Kades se-Kabupaten Kotawaringin Barat.
3. Perwakilan pengurus Parpol se-Kabupaten Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris BPKAD dan BAPPEDA Kab. Kobar.
5. ASN di Lingkungan Badan [Kesbangpol Kab Kobar](#).

Dalam sambutan Wakil Bupati menyampaikan beberapa hal dalam sambutannya sebagai berikut : Mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara atas terselenggaranya acara sosialisasi mengingat pemilu sebagai landasan hukum pelaksanaan pilkada serentak Tahun 2019. Pemilu adalah salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintah yang demokratis. Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil, hal ini tercapai apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan pemilu. Salah satu bagian terpenting adalah proses pemilu adalah peran dan partisipasi masyarakat sehingga perlu terus-menerus dilakukan sosialisasi.

Adapun pematiri masing-masing antara lain :

1. Dr. Aang Witarsa Rofik, M. Si (Kasi Monitoring dan Evaluasi) Ditjen Polpum Kemendagri menyampaikan Sosialisasi UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

menjelaskan beberapa hal terkait UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Terdapat 5 isu krusial yg akan dibahas dalam pembahasan UU pemilu 2017 dan khusus ambang batas persentase suara dan kursi di DPR RI yg dapat mencalonkan presiden pada pemilu 2019 tidak selesai pada tingkat pansus sehingga dibawa ke paripurna DPR RI.

2. Dr. Drs. H. Andi Muhammad Yusuf, M. Si (Kasi Informasi dan Komunikasi Parpol) Ditjen Polpum Kemendagri menyampaikan Sosialisasi PP No. 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Dana Partai Politik.

menjelaskan beberapa hal terkait peningkatan Dana Bantuan Parpol dalam rangka peran Pemerintah menguatkan kelembagaan Parpol, dimana Parpol mencetak calon pemimpin dalam pelaksanaan Pemilu. Upaya penguatan Kelembagaan Parpol merupakan alasan penting Pemerintah melalui peningkatan Bantuan keuangan Parpol.



